



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HUDRI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 689784

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.238.100.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/206 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 206.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
3. Tanah Seluas 3.542 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 179.100.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/285 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/260 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI , Rp. 340.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/67 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
7. Tanah Seluas 3.023 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 453.000.000**

1. MOBIL, MITSUBSIHI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, BOX COLT DIESEL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



3. MOBIL, BOX T 120 SS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.696.364
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.732.796.364
III. HUTANG	Rp.	920.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.812.796.364

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.